

Laporan Kinerja 2016

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Deputi Bidang Pembangunan ManusiaDan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2016 telah tersusun. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja yang direncanakan, telah tercapai dan usaha dalam mengerjar ketercapaian tersebut oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tujuan paling utama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini berisi laporan peihal hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja sepanjang Tahun 2016, dan sejauh mana pelaksanaan strategi tersebut terlaksana dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa, khususnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari isi laporan kinerja ini memberikan gambaran dan informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. dengan harapan agar dapat memberikan rekomendasi berkualitas dalam penyusunan rencana kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang optimal di masa yang akan datang.

Umpan balik dan perbaikan berkesinambungan bagi perkembangan kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di masa yang akan datang sangat diharapkan terutama dari pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, Januari 2017 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Rahayu Kadarwati



RINGKASAN EKSEKUTIF

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode Tahun 2016 telah melakukan peningkatan kualitas kinerja dengan menciptakan beberapa strategi kinerja di lingkungan kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang lebih berorientasi kepada *outcome* yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode Tahun 2016 lebih difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis yang menjadi kompetensi utama kedeputian substansi. Sasaran strategis tersebut yaitu "Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi" dengan indikator kegiatan berupa:

- 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu;
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
- 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode tahun 2016 mencapai sebesar 100%, untuk pelaksanaan rekomendasi yang ditindaklanjuti walaupun secara teknis berkas yang ditindaklanjuti belum tercapai secara maksimal jika dibandingkan dengan target awalnya. Namun, secara keseluruhan capaian Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun realisasi anggaran dari total anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 800.000.000, sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.621.628.400 atau sebesar 98.90% setelah pengurangan self blocking sebesar Rp 169.576.000,-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat merealisasikan antara perencanaan program kerja dan kegiatan dengan pelaksanaan kinerja oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang periode tahun 2016.

Pencapaian kinerja selama periode Tahun 2016, secara umum termasuk dalam kategori sangat baik, namun pencapaian tersebut masih dapat lebih ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Beberapa langkah ke depan tersebut antara lain:

- Peningkatan sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan penekanan lebih kepada pelaksanaan teknis yang lebih fokus dan konsekuen;
- 2. Peningkatan *personal capacity building* di lingkungan kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Peningkatan sinergisitas lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan capaian output Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Peningkatan peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di setiap forum diskusi, seminar, rapat koordinasi baik lokal maupun internasional terkait bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, maupun Transmigrasi;
- 5. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



DAFTAR ISI

	На
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	2
Transmigrasi	
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang	2
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (strategic issued)	6
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	7
2. Aspek Keuangan/Anggaran	7
3. Aspek Tata Laksana	8
4. Aspek Sarana Prasarana	8
D. Permasalahan Utama	8
E. Langkah Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Gambaran Umum	12
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016	16
BAB III CAPAIAN KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	18
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kineria dan Alternatif Solusi	32

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	34
Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
1. Realisasi Anggaran	38
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	42
Daftar Pustaka	
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi	

Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Tahun 20162. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2016
- 3. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016



DAFTAR TABEL

		На
Tabel 2.1	Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,	14
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang	16
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
	Tahun 2016	
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Capaian	22
	Kinerja	
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis	24
Tabel 3.4	Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang	30
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
	(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)	
Tabel 3.5	Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas Asisten	31
	Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	
	Transmigrasi Periode Tahun 2016	
Tabel 3.6	Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan	36
	Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi	
	Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	
	Transmigrasi Tahun 2016	
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan	39
	Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode 1	
	Januari sampai dengan 31 Desember 2016	
Tabel 3.8	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan	40
	anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1	
	Januari sampai dengan 31 Desember 2016	

BAB Satu

Satu PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu kepemerintahan yang baik (good governance) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan pengembangan kebijakan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui gambaran tidak hanya informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Pada pertengahan tahun 2016, pengurangan pagu anggaran di setiap kementerian/lembaga di seluruh Indonesia berdampak terhadap perubahan pengalokasian anggaran dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil kebijakan

untuk melakukan perubahan pada dokumen penganggaran dan merubah pelaksanaan program dan kegiatan dengan sisa anggaran secara optimal.

B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

a. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- 2) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari (3) tiga bidang yaitu :

a. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi peraturan perundang-undangan, rancangan penyiapan analisis pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- 1) Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa; dan
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi peraturan perundang-undangan, rancangan penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Pembangunan Daerah Tertinggal.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

c. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi

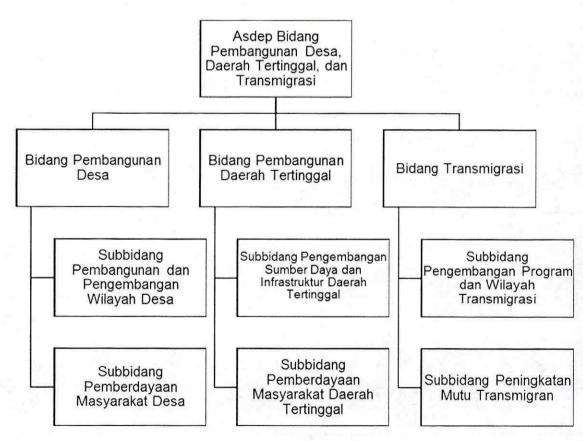
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Bidang Transmigrasi terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- 2) Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:





C. Aspek Strategis (strategic issued)

Aspek strategis merupakan hal-hal (issues) yang sifatnya strategis yang berdampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dalam fungsinya membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Melalui tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja dalam posisi netral, terbebas dari ego sektoral, mampu memberikan analisis dan pandangan serta analisis dan pemikiran di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama pemangku kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menjadi perhatian utama Presiden dan atau Wakil Presiden.

Dalam menjalankan fungsi sebagai manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK. Keterlibatan aktif dalam proses manajemen kabinet dimulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan

kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengantisipasi dan menyiapkan materi atau bahan pembahasan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan masukan berupa beberapa alternatif pertimbangan untuk membantu memberikan masukan keputusan oleh Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek tersebut diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (empowerment) pejabat/ pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan keikutsertaan di setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/ workshop, yang ditawarkan terutama berhubungan langsung yang dengan bidang pembangunan daerah desa, tertinggal, dan transmigrasi. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis keuangan/anggaran yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan

manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah teringgal, dan transmigrasi.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis dari pelaksanaan tata laksana lebih ditekankan kepada penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan tetap melakukan evaluasi prosedur kerja yang telah disusun dan diterapkan di seluruh kedeputian Sekretariat Kabinet serta dengan tetap mencari kemungkinan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan untuk maju dari para pemangku kepentingan *(stake holders)* dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

D. Permasalahan Utama

Meskipun Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki posisi strategis, namun permasalahan-permasalahan yang timbul berimplikasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif. Selama ini yang menjadi permasalahan utama (strategic issued) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya peningkatan kinerja di keasdepan, khususnya Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, permasalah tersebut diantaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang kompeten. Komposisi SDM saat ini berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait tugas utamanya adalah SDM yang kompeten terhadap kebijakan publik (public policy) maupun menganalisis permasalahan atas kebijakan publik (public policy analist). Kekurangan SDM yang berkompeten terhadap permasalahan kebijakan publik (public policy) tersebut menghambat kecepatan dalam pengelolaan rekomendasi kebijakan maupun rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

2. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menjalin *networking* dan atau kerjasama yang terkoordinir dengan kementerian/lembaga/ instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif baik yang bersinggungan langsung ataupun tidak terhadap bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Hal itu berhubungan dengan perolehan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan akurat dalam meganalisis atau rekomendasi yang kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaanya, permasalahan timbul berupa dinamika respon yang berbeda dan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk beberapa *stakeholder*.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang berbasis teknologi

Peningkatan peran serta Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi berbasis teknologi dengan lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terutama penyusunan penyiapan

rekomendasi kepada Presiden dan atau Wakil Presiden yang bersumber dari pemanfaatan database berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah strategis yang dapat diupayakan diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (competence) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dapat diatasi melalui keikutsertaan secara aktif oleh pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet; maupun oleh instansi-instansi yang berkompeten dalam memenuhi kebutuhan terhadapa peningkatan capaian kinerja, terutama pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan dengan pemanfaatan elektronik berbasis teknologi dan sistem informasi. Sehingga dalam penerapannya telah tersinkronisasi dengan sistem informasi dan elektronik berbasis teknologi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet dan dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana penunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan e-government.

BAB Dua

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan instansi pemerintah tersebut menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana penjelasan dalam Bab I dari Laporan Kinerja ini, maka perencanaan kinerja tersusun dari mulai perencanaan awal Tahun 2016 (Bulan Januari 2016) sampai dengan pelaporan pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2016 (31 Desember 2016).

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Uraian Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)

Sebagaimana telah disinggung di atas, target kinerja (*output*) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada awal tahun 2016 direncanakan mencapai 100%. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa semua laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan harus ditindaklanjuti dengan menghasilkan laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan penyusunan laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan pada umumnya berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 sasaran program/kegiatan dari 1 (satu) sasaran program/kegiatan di Tahun 2016 yaitu:

SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada dasarnya berasal baik dari output maupun outcome yang dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya di periode akhir 2016 ini berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sasaran capaian kinerja tersebut dicapai dengan menggunakan 6 (enam) indikator yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) program pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Uraian Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(2)	(3)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang	 Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 	100 %
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	 Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu. 	100 %
	3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100 %
	4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100 %
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100 %
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100 %

Sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1., bahwa capaian yang harus dicapai oleh Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 adalah Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat dilihat dari indikator sasarannya yaitu:

- Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, terdapat dua kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu kriteria "ditindaklanjuti" oleh Deputi Bidang PMK dan kriteria "tepat waktu". Untuk itu, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka rekomendasi di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang tahun 2016 ini kepada pimpinan harus ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 100% dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan. Kemudian, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menetapkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang sama, maka keseluruhan rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2016 harus diselesaikan secara tepat waktu.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

Sebagaimana Subbab tentang Perjanjian Kinerja (PK) 2016 di atas, maka ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 menggunakan indikator kinerja utama sebagai mana berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	 a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah 	Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selain itu, Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
		Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB Tiga

Tiga CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 menyajikan akuntabilitas kinerja yang berisi informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan analisis capaian indikator hasil (outcome) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan atau kendala beserta permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Asisten Deputi Bidang Pembangunanan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan sesuatu dengan menggunakan alat ukur. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan ataupun ketidakberhasilan antara pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan atas program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut. Guna mengatasi berbagai kerumitan didalam mengukur berbagai tingkatan dan agregasinya maka digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari berbagai indikator yang dianggap paling relevan untuk mewakili dan menggambarkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

Pencapaian Sasaran

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2016 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tersebut. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2015—2019 sekaligus merupakan tahun ke-2 (dua) setelah proses restrukturisasi dalam lingkungan organisasi Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 ini akan menerangkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang

tahun ke-2 (dua) pasca-restrukturisasi dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Untuk mempermudah pemahaman terkait pencapaian sasaran tersebut, maka Bab III ini berisi uraian dari pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program kerja yang di dalamnya memuat 3 (tiga) indikator kegiatan utama. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tersebut, kegiatan melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Perumusan dan penyampaian analisis secara top down ditentukan oleh arahan Sekretaris Kabinet, sedangkan perumusan dan penyampaian analisis secara bottom up berarti ide awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/ atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dianalisis.

Capaian Kinerja Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki 1 (satu) sasaran Program/Kegiatan Strategis unit kerjanya sebagaimana telah dijabarkan diatas, sasaran strategis tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan dijelaskan dibawah ini.

Demikian halnya dengan sasaran strategis, IKU yang digunakan juga berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai berikut:



- A. PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:
- B. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN:
- C. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016:

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Capaian Kinerja Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

CACADAN	DULYALUM		TARGET		REAL	REALISASI KINERJA		CAPAIAN
URUHINAII	INDINALUR	E	% OUTPUT	DUTEDME	DUTPUT	DUTCOME	8	名
Terwujudnya Rekomendasi yang		TWI	100 14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi		101
Berkualitas di Bidang		TW2	100 20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	31 Rekomendasi	31 Rekomendasi		100
Pembangunan Jesa, Daeran Tertinggal dan Transmiorasi	Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Ridana Pembanaman Manusia dan	TW3	100 20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi		100
	Kebudayaan.	TW4	100 27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi		
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang	TWI I	100 14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	17 Rekomendasi	17 Rekomendasi	100	
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	TWZ 1	00 20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	31 Rekomendasi	31 Rekomendasi		100
	Iransmigrasi yang disusun secara tepat waktii	TW3	OO 20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	111	8
	Hanta	TW4	00 27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi		00
20	Persentase rekomendasi persetujuan atas	TWI	100 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	111	П
	permohonan izin prakarsa dan substansi	TW2	100 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	O Rekomendasi	O Rekomendasi		
	rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Naprah Tentinonal dan Transmiorasi yang	TW3 1	100 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	l Rekomendasi	1 Rekomendasi	101	100
	ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	TW4	100 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	001	=
	Persentase rekomendasi persetujuan atas	TWI	100 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	00)	8
	permohonan izin prakarsa dan substansi	TW2	100 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	O Rekomendasi	O Rekomendasi		100
	rancangan ruu di bidang rembangunan vesa,	TW3	100 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	BB	B

CACADAN	MUNKATOD			TARGET		REALI	REALISASI KINERJA		CAPAIAN
SHUMINAIN	VILLALIA	M.	%	UITPUT	DUTCOME	TUTTUL	DUTCOME	%	%
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang	TW4	100 1Re	100 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	1111	
	disusun secara tepat waktu.								
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang TWI		100 4 Rt	100 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
	kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	TW2	100 5 Re	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	100
	dan/atau dinadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di hidam Pemhanninan Desa	TW3	100 5 Ri	100 5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi		
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang	TW4	100 4 Rt	100 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	G Rekomendasi	100	00
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.								
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang TWI 100 4 Rekomendasi	IMI I	100 4 RE		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	1111	100
	kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	TWZ III	100 5 Re	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi		001
	dan/atau dinadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di hidam Pembanninan Nesa	TW3	100 5 Re	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi		100
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang	TW4	100 4 RE	100 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi		100
	disusun secara tepat waktu.								

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Secara singkat, capaian sasaran strategis tersebut dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis (Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100

SASARAN STRATEGIS

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengukur pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", menggunakan indikator kegiatan, yaitu indikator "yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan yang disusun secara tepat waktu" yang tercermin dalam indikator-indikator kegiatan utamanya, antara lain:

- Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

"Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus dilihat dari ketepatan subtansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholder* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **95 (sembilan puluh lima) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya (100%) dimanfaatkan oleh Deputi Bidang PMK dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator-indikator diatas (berdasarkan tabel 3.3) ini adalah **100**% dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

"Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu."

Berdasarkan data pada tabel 3.2 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk kecepatan (secara tepat waktu) menggunakan perhitungan yang melibatkan populasi seluruh rekomendasi kebijakan, kemudian dihitung waktu yang digunakan per masing-masing berkas yang diselesaikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, telah diselesaikan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) berkas rekomendasi kebijakan dimana dapat diselesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu capaian outcome Deputi Bidang PMK untuk indikator diselesaikan tepat waktu ini mencapai target 100%. Dengan kata lain, berkas rekomendasi kebijakan yang diselesaikan tepat waktu. telah memenuhi kriteria indikator ketepatan waktu penyampaian, dan dapat dikategorikan sangat baik.

Kembali perlu disampaikan disini bahwa dalam SOP terkait saran kebijakan pada organisasi untuk perhitungan terhadap indikator ketepatan waktu penyampaian distandarkan untuk waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dihitung selama 11 (sebelas) hari kerja. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian rekomendasi yang melebihi waktu penyelesaian dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, disamping karena permasalahan penyelesaian dan respon terhadap berkas

berbeda-beda. Selain itu terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja sehingga rekomendasi yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas memerlukan waktu penyelesaian melebihi dari standar yang ditetapkan dalam SOP.

Sementara itu ada rekomendasi kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan rekomendasi kebijakan tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respons*).

"Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."

Sejalan dengan perkembangan restrukturisasi organisasi, penyempurnaan fungsi perumusan rekomendasi kebijakan yang dijadikan *output* dan termasuk juga sebagai indicator pada subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama *output* berupa perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian bermuara atas kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan perumusan rencana kebijakan terdapat kegiatan antara lain berupa ijin prakarsa, surat pertimbangan, rekomendasi kebijakan natara lain berupa ijin prakarsa, surat pertimbangan, rekomendasi kebijakan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian dan materi substansi. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator ketiga yaitu "Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang di ajukan oleh instansi/kementerian/ lembaga pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka terdapat 11 (sebelas) berkas rekomendasi untuk indikator kegiatan ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Dari 11 (sebelas) berkas tersebut, keseluruhannya telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, capaian indikator kedua ini adalah 100% dan dikategorikan sangat baik.

"Persentase Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu."

Sebagaimana indikator sebelumnya, untuk indikator ini menggunakan Standar Operating Procedures terkait saran kebijakan pada organisasi dalam mengukur ketepatan waktunya berdasarkan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target 100% dimana dari keseluruhan berkas rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan sebanyak 11 (sebelas) berkas rekomendasi diselesaikan secara tepat waktu. Capaian ini juga dikategorikan sangat baik.

"Persentase Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan Yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Tugas dan fungsi ini sebelum restruktur organisasi berada di Kedeputian Bidang Persidangan dalam perjalanannya diserahkan kepada kedeputian substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan tabel 3.2 diatas, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak 19 (sembilan belas) berkas rekomendasi kebijakan, dimana keseluruhannya ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai 100% dengan kategori sangat baik.

"Persentase Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/Atau Dihadiri Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Disusun Secara Tepat Waktu."

Indikator keenam atau terakhir ini merupakan indikator kecepatan penyelesaian dari indikator kelima diatas. Sebagaimana indikator kecepatan

lainnya, indikator ini pun memiliki SOP. Patokan penyelesaian menggunakan SOP yang terkait atau relevan dengan perhitungan berdasarkan 11 (sebelas) hari kerja.

Capaian indikator kinerja ini adalah 100% dimana antara jumlah berkas yang masuk dan diproses sama dengan jumlah berkas yang keluar, yaitu 19 (sembilan belas). Capaian kinerja ini secara keseluruhannya sebesar (100%) telah disampaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, capaian indikator ini pun secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar keenam indikator diatas, maka perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Perjanjian Kinerjanya, yaitu: kriteria "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti" secara keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator jika digabungkan, maka selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan 125 (seratus dua puluh lima) berkas rekomendasi yang berkualitas dimana sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) rekomendasi atau seluruhnya telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau Sekretaris Kabinet (capaiannya: 100%) dan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) rekomendasi dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (capaiannya: 100%). Berikut adalah rinciannya.

Tabel 3.4

Capaian Rekomendasi yang Berkualitas
Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)

VOITERIA VAVARIAN	REALISAS	CAPAIAN		
KRITERIA SASARAN	DUTPUT	DUTCOME	%	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100	

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II Perencanaan Kinerja, maka dari data-data yang telah disebutkan diatas, **pencapaian IKU** Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah **100%** untuk setiap indikator utama. Hal ini terlihat dari ditindaklanjutinya atau dimanfaatkannya semua berkas rekomendasi yang disampaikan, baik oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun oleh Sekretaris Kabinet.

Selanjutnya, jika capaian keenam indikator kinerja sebagaimana telah disebutkan diatas disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran "terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi", yaitu sebesar 100%, dengan rata-rata untuk indikator tindak lanjut sebesar 100% dan indikator tepat waktu sebesar 100%, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik.

Dari total berkas tersebut, maka realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 ini adalah perbandingan keseluruhan antara berkas *output* sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) berkas dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) berkas sehingga menghasilkan angka capaian 100%. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 untuk mencapai rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Tabel 3.5

Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			CAPAIAN %	
	OUTPUT	DUTCOME	DUTPUT	DUTCOME	CAPAIAN %	ОИТРИТ	DUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	104 Rekomen -dasi	104 Rekomen -dasi	125 Rekomen -dasi	125 Rekomen -dasi	100	120,2	120,2

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal untuk mendukung kegiatan Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- 2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.
- 3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.
- 4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2016 dapat dikategorikan **Sangat Baik**, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

- Keterbatasan kemampuan SDM di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan perumusan dan analisis serta penyusunan rekomendasi sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah terpinggir, terluar, dan terpencil.
- Adanya perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.
- 4. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja.

- 5. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan stakeholder berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kekurangan atas dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan, oleh stakeholder.
- 6. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- 7. Kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan Pemerintah, dalam hal ini kebijakan pengurangan (penghematan) anggaran oleh Kementerian keuangan kepada seluruh K/L berimplikasi terhadap pengumpulan data dan informasi ke daerah.

ALTERNATIF SOLUSI

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan sebagai upaya dalam pencapaian sasaran, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- Lebih efektif, efisien dan intensif dalam menjalin komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan.
- Penambahan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 4. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumendokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

6. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa. daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap hot issues.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagaimana telah disinggung diatas, pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asisten Deputi Bidang di bidang Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dimulai dari:

1. Top Down

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. Bottom Up

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asisten Deputi Bidang di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, workshop dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau briefing sheet, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas

permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan antara lain adalah: (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa; (2) Hasil kegiatan Diskusi Publik "Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sebagai Upaya Menciptakan Pemerataan Pembangunan; (3) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat; (4) Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 3.6

Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

	PERMASALAHAN	REKDMENDASI		
PE	PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA			
1)	Seminar Nasional dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Dalam Rangka Menggalai Permasalahan dan Menemukan Solusi Bersama	a. Aspek Regulasi Berupa Keterlambatan proses penyaluran dana desa, potensi tumpang tindik kewenangan dan regulasi lintas kementerian;		

Terkait Proses Penganggaran, Penyaluran	١,
Penggunaan, dan Pertanggungjawaban.	

- Aspek Tata Laksana
 Kompetensi perangkat desa yang terbatas, kebijakan pendampingan desa yang belum optimal, kompetensi perangkat desa terhadap anggaran terutama anggaran negara;
- c. Aspek Monitoring
 Belum adanya mekanisme pengendalian,
 monitoring, dan evaluasi yang terkoordinasi

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) MASYARAKAT ADAT

Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat

- Pembentukan satuan tugas masyarakat adat yang bertugas memahami secara utuh dan komprehensif terhadap pokok-pokok persoalan masyarakat adat terutama mengenai keberadaannya dan kaitannya dengan penguasaan tanah dan konflik agraria;
- b. Rencana pembentukan satuan tugas masyarakat adat akan diatur dalam Rkeppres perlu dikaji kembali;
- c. Namun, apabila Satga Masyarakat Adat tetap terbentuk maka perlu dipertimbangkan akan tugas dan kewenangan satgas tersebut terhadap Presiden.

KEGIATAN DISKUSI PUBLIK "MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN'

Kegiatan diskusi dilakukan dalam rangka memperoleh data perkembangan dan problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan percepatanpembangunan daerah tertinggal dan mengkonsolidasikan dan merumuskan kebijakan bersama mengenai pembangunan daerah tertinggal

- a. Beberapa permasalahan yang timbul dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, rendahnya ketersediaan infrastruktur publik, aksesibilitas rendah (daerah tertinggal cenderung tidak terlayani oleh kapal penumpang) dan mahalnya biaya angkut di Indonesia terutama di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
- Rekomendasi penyelesaian atas permasalahan antara lain melalu adanya pertemuan yang mengkonsolidasi peran pemangku kepentingan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menciptakan suatu kebijakan yang integratif dan menyeluruh;
- c. Mempercepat penyusunan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Rencana Aksi Nasioanl Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT).

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL DAN RENCANA AKSI NASIONAL Percepatan Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019

Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Rperpres STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT)

- a. Rancangan Perpres disusun sebagai pelaksanaan atas Pasal IO ayat (I) dan Pasal II ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Rancangan Perpres tersebut telah beberapa kali dibahas dengan koordinasi oleh Kemendes PDTT dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait;

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran difokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggung jawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan anggaran tetapi juga mencapai aspek efektifitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Realisasi Anggaran

Dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar Rp. 800.000.000,-; Sampai dengan akhir tahun 2016, Asisten

Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar Rp.621.628.400,- atau sebesar 77,70% dari total anggaran. Perlu diketahui bahwa anggaran yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pertengahan Tahun 2016 mengalami penghematan (self Blocking) sebesar Rp 169.576.000,- (21,197%). Oleh karena itu, ketika penghematan/self blocking terjadi, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap harus melaksanakan sasaran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja. Untuk menyesuaikan antara anggaran yang tersedia dengan tugas dan fungsi, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan revisi anggaran dengan menambahkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, walaupun kegiatan utamanya, Indikator Kinerja Kegiatan, maupun output yang tercantum dalam dokumen POK tidak mengalami perubahan.

Berikut disajikan capaian kinerja anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi, sepanjang periode Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/ Pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

KODE	DETIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)	REALISASI Anggaran (Rp.)	CAPAIAN (%)
PEMB	NGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG Angunan desa, daerah tertinggal, dan Smigrasi	800.000.000	621.628.400	77,70
411	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	208,665,000	204,364,400	97,93
412	Penyusunan Rekomendasi Terkait Persetujuan Permohonan Ijin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Di	6,258,000	6,258,000	100

	Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.			
413	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/Atau Dihadiri Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	585,077,000	411,006,000	70,24

Perlu disampaikan bahwa keseluruhan capaian anggaran Tahun 2016 sepanjang periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami revisi anggaran sebanyak dua kali. Revisi tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya Self Blocking/penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Besaran anggaran yang harus dibebankan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp 169,576,000,- atau sebesar (21,197%). Pemotongan anggaran tersebut diambil dari pagu anggaran 412 dan mengalami pengurangan dari Rp 100,585,000 menjadi Rp 6,258,000,-; Adapun untuk pagu anggaran 413 mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp 490,750,000,- menjadi Rp 585,077,000 dengan penambahan sebesar Rp 94,327,000,- (rincian anggaran tersebut disusun pada tabel 3.7)

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Gambaran Tentang Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

CAPAIAN OUTCOME %	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
77,70	77,70 Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa,	Output	Rekomendasi	104	125
		Input	Rupiah	800,000,000	621,628,400
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Input rata-rata per output	Rupiah	7,692,307	4,973,027

Demikian halnya untuk pencapaian sasaran strategis setelah terjadinya pemotongan (self blocking) dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar Rp.800,000,000,- yang direncanakan untuk membiayai kegiatan seharusnya menghasilkan 104 (seratus empat) berkas rekomendasi (target ini adalah target awal yang tercantum dalam berkas POK yang tidak berubah sampai akhir periode tahun 2016) mengalami pemotongan menjadi Rp 621,628,400,-, Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp.621.628.400,dengan sisa anggaran keseluruhan setelah dikurangi dengan anggaran self blocking/penghematan sebesar Rp 8.795.600,-. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 125 (seratus dua puluh lima) berkas rekomendasi yang ditindaklanjuti. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas output dibutuhkan dana rata-rata Rp.4.973.027,-; lebih rendah dari anggaran rata-rata per output yang direncanakan sebesar Rp.7.692.307,-; Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 35.35% atau Rp.2.719.280,- per output. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran sudah efektif dan efisien.





DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang	12
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
	Tahun 2016	
Tabel 2.7	Target Kinerja dan Anggaran Asisten Deputi Bidang	14
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
	Tahun 2016	
Tabel 2.3	Target Kinerja Sasaran Asisten Deputi Bidang	17
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
	Tahun 2016	
Tabel 2.4	Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Asisten Deputi	XQ
	Bidang Pembangunan Desa Daerah Tertinggal, dan	
	Transmigrasi Tahun 2016	
Tabel 2.87	Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang	201
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
3.1	Tahun 2016	
Tabel 2.6	Kategori Capaian Kinerja	25 6
Tabel 2.7	Capaian Kinerja whoma primeryo capai an kunurja	-26_
Tabel 3.12	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja	28 2
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis	30 2
Tabel 3. 3	Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang	33 30
	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
2	(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)	
Tabel 3.4	Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas Asisten	25 3
ŕ	Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	
	Transmigrasi Periode Tahun 2016	
Tabel 3.6	Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan	37
~~~	Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi	
	Bidang P <del>endidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</del>	
	Tahun 2015 (	



C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	48-34
Pencapaian Kinerja	
B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53 38
1. Realisasi Anggaran	53 38
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
AR IV PENIITIIP	62

### **BAB IV PENUTUR**

### **Daftar Pustaka**

### Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015
- 2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015
- 3. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2015
- 4. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2015



### DAFTAR ISI

	Hai
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii .
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,	2
Riset, dan Teknologi	
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan,	2
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
2. Struktur Organisasi	3 ~
C. Aspek Strategis (strategic issued)	6 v
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	7 ~
2. Aspek Keuangan/Anggaran	71
3. Aspek Tata Laksana	8
4. Aspek Sarana Prasarana	8
D. Permasalahan Utama	8
E. Langkah Strategis	2/0
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11/2
A. Gambaran Umum	1112
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 201₺	11/2
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015	25 16
BAB III CAPAIAN KINERJA	27 18
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	27 B
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	27 B





### BAB Empat PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya penghematan (self blocking) anggaran organisasi Sekretariat Kabinet yang memaksa seluruh unit kerja, utamanya di lingkungan Deputi Bidang PMK, termasuk didalamnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menahan diri tidak menggunakan anggaran sampai dengan revisi anggaran telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan permasalahan utama nya adalah dikarenakan pemotongan (self blocking) ini berlaku kepada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan besaran yang belum dapat diputuskan. Dengan anggaran yang dihemat benar-benar berubah, waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tinggal sedikit sehingga ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari pertengahan Tahun 2016 sampai dengan Oktober 2016, sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 berdasarkan sisi kecepatan maupun ketepatan, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**. Ini pencapaian luar biasa mengingat sumber daya manusiadi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2016 ini sangat terbatas. Para pejabat dan pengawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejar ketertinggalan walaupun dengan waktu yang sangat minim.

Selama satu tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak 125 berkas rekomendasi, dengan total sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) berkas rekomendasi yang berkualitas, dimana keseluruhannya termasuk dalam kategori ditindaklanjuti (*outcome*). Dari total berkas tersebut, maka realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 125 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 125 sehingga menghasilkan angka capaian 100%. Sementara perbandingan antara target awal sejumlah 104 berkas dengan jumlah berkas yang dihasilkan 125 berkas secara keseluruhan sangat jauh melebihi target yaitu sebesar 120,2%.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan akhir Tahun 2016 tercapai sebesar Rp.621.628.400,- atau sebesar 77,70% dari total anggaran setelah Pemotongan (self blocking) sebesar Rp 169.576.000,- (21,197%). Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2016 oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar Rp 7.692.307,- per output menjadi Rp 4.973.027,- per output. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya capaian efisiensi tersebut sebesar 35.35% atau Rp.2.719.280,- per output.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

### Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Ketidaksempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2016 ini dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi antara kegiatan dengan anggaran yang disiapkan untuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan kinerja yang matang dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dapat mengakomodir kemajuan substansi dan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Peningkatan *capacity building* dan manajeman kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga;
- 3. Meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 5. Perlunya penyempurnaan Standar Operaional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang akan segera ditetapkan di tahun 2017;
- 6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan e-government.





### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: Rahayu Kadarwati

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Surat Indrijarso

Jabatan: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

29 Januari 2016 Jakarta. Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Surat Indrijarso

Rahayu Kadarwati

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

ınan

1

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%

	Kegiatan	Anggaran
	ungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang bangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1.	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp208.665.000,00
2.	Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp100.585.000,00
3.	Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp490.750.000,00
	Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Rahayu Kadarwati

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 29 JANUARI 2016

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

# A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET

- 1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet
- Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pembenian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Tugas
  - pembangunan manusia dan kebudayaan.
- 3. Fungsi
- Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; ä
- Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di pembangunan manusia dan kebudayaan;
- Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

-2-

Utama:
Kinerja
4. Indikator
4.

		1375	
Alasan	n Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam	penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet	
Uraian 1KU	. Persentase rekomendasi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	<ol> <li>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</li> </ol>	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan	Neoudayaan	· Θ
jo Pi	<del>-i</del>		

-3-

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangatau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga

. Fungsi

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, yang Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. مَم

olahraga;

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 4. Indikator Kinerja Utama :

-4-

त्रवक्षम	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Úraigh IKU	<ol> <li>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> </ol>
Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
No.	÷ .

C. INDIKATOR ...

Ϋ́

## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nama Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

. Tuga

Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

3. Fungsi

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; teknologi; مَن

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ė,

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

90
B
tan
Ċ
Kineria
Indikator
Ŀ

		1000
	Asisten relevan, ; sesuai dalam alalam Bidang eknologi Manusia	
	n kin bat dic dapat fungs n kek kabin Riset,	
Alasan	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, dapat dikuantifikasi, dan dapat diuku dengan tugas dan fungsinya penyelenggaraan dukungan kebijakau pengelolaan manajemen kabinet di Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T	
	n per spesij utifikas igas aan d mana Kebuda	aan
	njukkau i yang dikuar dikuar tu enggar olaan likan, ]	dan Kebudayaan
	Menur Deputi dapat dengar penyel pengel Pendid	dan Ke
	n, oleh zin	apat ,
	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapa atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	ng Per indakle i Kebuc Sermok Bidan, logi ya	ng kab ihadiri g Pend ndakla Kebuc
A	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendic Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanji Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday Persentase rekomendasi persetujuan atas permohon prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Ma	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidika Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
DWI T	jakan ologi ya Manus etujuan ingan l	it maten dan/iden digen dologi ye
Uraian IKU	si kebi n Tekna gunan si perse i rance un, Rise puti Bi	si terka ipimpi cil Pres n Tekno gunan
	nendas set, dar emban nendas bstans udayas	nendas yang d au Wak et, dar
	Persentase rekom Kebudayaan, Riss Deputi Bidang Pe Persentase rekom prakarsa dan sub Pendidikan, Kebu ditindaklanjuti ol dan Kebudayaan	rekon muan an/ata an, Ris lang Pe
	sentase udaya uti Bic sentase karsa c didika ndakla Kebuc	sentase 1 perte siden d udayaa uti Bid
	<ol> <li>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> </ol>	<ol> <li>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> </ol>
	set,	c)
egis	endasi Bidang yaan, F	
Sasaran Strategis	Rekom tas di ebuday	
Sasara	ıdnya erkuali kan, K cnologi	
	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
No.	i	
使不及語		

-7-

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN D.

Nama Organisasi

Pemberdayaan Perempuan, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Anak

dan

2. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

3. Fungsi

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; Ď.

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; ပ

Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; ö

Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; ė

Pemantauan...



Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. ઌ

### 4. Indikator Kinerja Utama :

1	-		
		Asisten relevan, sesuai dalam dalam Bidang dungan dan	Susterior of the Control of the Cont
		Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
		aian k lapat d n dapat fung igan ke n kabii skinan, Pere	
		pencape esifik, c kasi, da dan t dukur unajemer Kemii rdayaan nak k	
		ikkan yang sp kuantifi tugas ggaraar aan me ulangan Pembe ngan A	
		Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
		ng usia izin ng usia	rapat langan npuan, ti
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan N dan Kebudayaan Persentase rekomendasi persetujuan atas permoho prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan M dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggu Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perer dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Depu Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	KU	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Semberdayaan Perempuan, dan Perlindungan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembanguan Kebudayaan Persentase rekomendasi persetujuan atas perr prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bid Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Se Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangur dan Kebudayaan	materi dan/ata en di Bi ul, Pemb indakla dan Ket
	Uraian 180	kebija an, dan uti Bida persetu rancan inan, Pa an, dan uti Bida	terkait bimpin I Preside an Sosia yang dit
	100000000000000000000000000000000000000	nendasi Kemisk erempu leh Dep nendasi Stansi Kemisk erempu	nendasi 7ang dir 1u Wakii Indunga 1 Anak 1
		e rekon yaaan Pa unjuti ol dayaan e rekon dan suk langan yaan Pe unjuti ol	e rekom smuan J lan/ata an, Perli dungar mbanga
		Persentase rekom Penanggulangan Pemberdayaan Pe ditindaklanjuti ol dan Kebudayaan Persentase rekom prakarsa dan sub Penanggulangan Pemberdayaan Pe ditindaklanjuti ol dan Kebudayaan	au perte esiden o miskina n Perlin dang Pe
			S. S. P.
		asi ng inan, an, dan	
	Sasaran Strategis	comende di Bida Kemisk sial, srempue ak	
	aran Si	nya Rek nalitas langan gan Sos yaan Pe gan Ang	
The same of the sa	Sas	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
Chick Street or seatons	<u>ب</u>	1. P. P. P	
0			

-6-

# E.INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

. Nama Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2. Tugas

pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan

bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

3. Fungsi

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; ä.

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; i

Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; ö

Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; i,

Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal,

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...

4. Indikator Kinerja Utama :

	The state of the s
- 1	
	STATE OF STREET STATE OF STREET
	ALCOHOLD STREET
	March 1

	Asisten relevan, r. sesuai dalam n dalam Bidang gal, dan Bidang n	1
	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
븚	ian hapat dapat dapat dapat dapat dapat kungan kabii kabii terah De	10
Alasan	encapa sifik, d asi, dan dan dukun ajemen sisa, Dé repada	
	kan page specantifiks tugas araan araan nan belan Delan Manlan Manlan Manlan Manlan Manlan Manlan page sa page	
多· 第 第 第 第	unjukh uti yar ut diku yan elengg elolaar elolaar sangun sangra	
	Men Depi dape deng peny peng Pemi Tran	
	ng n uti yaan yaan yaan runan	
	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
	Persentase rekomendasi kebijakan di Bida Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, da Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Dej Bidang Pembangunan Manusia dan Kebud Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan D Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pemban Manusia dan Kebudayaan	
Uraian IKU	si keb aerah ' maanus si perse rsa dai ung Pen Transr Transr	
Urai	menda lesa, D ng ditii yunan nendaa I praka di Bida di Bida leh Dej	
	ie reko unan I rasi ya mbang e rekor an izir n PUU rtingga njuti o	
	Persentase rekomendasi I Pembangunan Desa, Daer Transmigrasi yang ditinda Bidang Pembangunan Mau Persentase rekomendasi p permohonan izin prakarsa rancangan PUU di Bidang Daerah Tertinggal, dan Tra ditindaklanjuti oleh Deputi Manusia dan Kebudayaan	
-	1. re: Per Tre Tre Bic Per Per Dac diti	
100	20 5	
Sasaran Strategis Terwujudnya Rekomendasi yang	aerah igrasi	
Sasaran Strategis udnya Rekomendasi	Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
<b>asara</b> nya Re	as di B man D ,, dan 1	
S	rkualit. Inggal	
Tei	Per Ter	-
Ä -		

3. Persentase....



-11-

Alasan			8					
	sidang	pimpin	tau Wakil	ı, Daerah	Idaklanjuti	usia dan		
Ureian IKU	Persentase rekomendasi terkait materi sidang	kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil	Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah	Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan	Kebudayaan	
No. Sasaran Strategis	Ċ.							

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

## Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Richard Model   Principles	À	V	500	Oi	0	<					
Participate   Target PK   Richard Keglatan   Rich											
				1	0	Ξ		pinipinan dari NE.	-		
			92,85714286	26	28	=	ransmigrasi yang dihasilkan	ilui penanganan atas berkas masuk dari			
Promotions   Traget PK   Stroigh Kegistan   S			114,2857143	16	14	-	lumlah rekomendasi kebijakan di bidang Jembangunan desa, daerah tertinggal, dan				
Trayet PK   Trayet PK   Trayet PK   Rindian Keplatan   Keraman			100	2	2	<					
Transpector				i	0	Ξ	v	transmigrasi.		RI	
Parsentiase   Target PK   Rincian Kegistan   Richardor Kinerja   Parsentiase   Target   Renational managament datam   Richardor Kinerjan   Parsentiase   Tivil   20 Berkas   Tiv				1	0	=	ransmigrasi yang dihasilkan				
Persentase   Indikator Kinerja   Target PK   Fincian Kegitatan   Ik			100	7	1	-	lumlah rekomendasi kebijakan di bidang bembangunan desa, daerah tertinggal, dan				
Persentiase   Tragen PK   Togen PK   Propumpular data dan programan				1	0	₹					
Pertenditase   TWI   16 Bervas   Pertenditase   TWI   10 Bervas   Pertenditase   Pertenditase   TWI   10 Bervas   Pertenditase   Pertend			100	2	2	Ξ		u ansimigrasi			
trategis (milikator Kinerja (mil			300	ω	7	=	ransmigrasi yang dihasilkan				
trategis Indikator Kinerja Iraget PK Rincian Keglatan (Apalan Keglatan Keglatan Keglatan Keglatan Keglatan Keglatan (Apalan Keglatan Besariasas (Apalan Keglatan Besariasas)) (Apalan Keglatan Besariasas (Apalan Keglatan Besariasas)) (Apalan Keglatan Besar				ı	1	-	lumlah rekomendasi kebijakan di bidang bembangunan desa, daerah tertinggal, dan	Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan		tepat waktu.	
trategis Indikator Kinerja Iraget PK  Rinolan Kepiatan  Persenitase  TVI : 100%  Persenitase  TVI : 14 Berkas penyauanan dalan pergawasan dalam ranjaka penbangunan dasa daerah tertinggal, dan ransingrasi yang dihasikan itan penbangunan dasa daerah tertinggal, dan ransingrasi yang dihasikan itan kebudayaan.  Menghadiri Fapat koordinasi/Semihar/Workshop/FQD/Keglatan Manusia dan kebudayaan.  Menghadiri Fapat koordinasi/Semihar/Workshop/FQD/Keglatan Jumiah nekomendasi kebijakan di bidang penbangunan desa, daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan desa, daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal, dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbangunan dasa daerah tertinggal dan transingrasi yang dihasikan di bidang penbang			800	œ	0	₹				dan Transmigrasi yang disusun secara	
trategis Indikator Kinerja Ingele PK Rinojan Kegistan IK			600	o.	-1	Ξ			TW IV: 27 Berkas	Daerah Tertinggal,	
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegistan Indikator Kinerja Indikator		0	100	2	2	=	ransmigrasi yang dihasilkan			kebijakan di Bidang	
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IX IX Kegiatan IX IX Kegiatan IX IX Kegiatan IX IX IX Berkas IX IX IX Berkas IX IX IX Berkas IX IX IX Berkas IX IX IX IX IX Berkas IX				i	6	_	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan	angka		rekomendasi	
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IKogiatan IKogiatan III Idaga Persentase 100% Pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka penyasunan rekomendasi kebijakan di bidang Persentase 100% Pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka penyasunan desa, daerah tertinggal, dan Tratsmitigrasi Mehijakan di Manganan desa, daerah tertinggal, dan Vir. 20 Berkas Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan Viv. 27 Berkas Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan Viv. 28 Berkas Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan Viv. 29 100 Pempusunan Rekomendasi kebijakan di bidang Pempusunan Rekomen			500	5	0	<					
ktrategis         Indikator Kinerja         Target PK         Rincian Kegintan         IK Kegintan         IK Kegintan         IK Kegintan         Target Revomendasi         "K. Capalian Trivulanan Persangan Menangan Persangan Pers				1	0	Ξ		pimpinan dan N.E.			
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan 100% Persentase 100% Persentase 100% Rebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Persentasi Pembangunan Desa, TVII : 14 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan IT arget Privil i 20 Berkas IT arget Privil i 20 Berkas IT arget Privil i 20 Berkas IT arget Privil i 20 III arget Pr			92,85714286	26	28	п	ransmigrasi yang dihasilkan	alui penanganan atas berkas masuk dari			
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK IK Kegiatan IK IK Kegiatan IK IK Kegiatan IK Kegiatan IK			114,2857143	16	14	-	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan	າວ			
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IIK Kegiatan IIK Kegiatan IIII 20 Barkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 20 Barkas IT VV II : 20 Barkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 20 Barkas IT VV II : 20 Barkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 20 8 800  Menghadin Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Menghadin Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Menghadin Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Menghadin Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Penyelenggaraan Penyelenggaraan Adam rangka pempangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Penyelenggaraan Penyelenggaraan Adam rangka pembangunan desa, daerah tertinggal, dan III 2 2 100  Penyelenggaraan III 2 3 300  IIII 2 3 000  IIII 2 0 100  IIII 2 0 100  IIII 0			100	2	2	<					
Irrategis         Indikator Kinerja         Target PK         Rincian Kegiatan         Ilk Kegiatan         Ilk Kegiatan         Target Realisasi         % Capaian         Keterangan Persandasi           Yang bidang lan Desat. TWI : 20 Berkas lan Teringgal, dan Desat. TWI : 20 Berkas lan Teringgal, dan Desat. TWI : 20 Berkas lan Teringgal, dan Transmigrasi         TWI : 14 Berkas lan Teringgal, dan lan				i	0	Ξ		bidang pembangunan desa, daeran terunggal, dan transmigrasi.			
Persentase   100%   Pers				1	0	=	ransmigrasi yang dihasilkan	į			
Itrategis         Indikator Kinerja         Target PK         Rincian Kegiatan         IK Kegiatan         IK Kegiatan         Target PK         Realisasi         Keterangan Capaian         Keterangan Capaian         IV Gapaian         Keterangan Capaian         Keterangan Capaian         Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang permbangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi         Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang permbangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi vang dihasilkan         II 2 2 100         Capaian         Keterangan Capaian         Keterangan Capaian         Keterangan Capaian         Keterangan Capaian         Lumlah rekomendasi kebijakan di bidang permbangunan desa, daerah tertinggal, dan vivi 22 2 100         III 2 2 2 100         III 2 2 2 100         III 2 2 2 100         III 2 3 300         III 3 300			100	1	1	-	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Dembangunan desa, daerah tertinggal, dan				
trategis         Indikator Kinerja         Target PK         Rincian Kegiatan         Rincian Kegiatan         IK Kegiatan         IK Kegiatan         Target PK         Realisasi         Keterangan         Keterangan         Capaian         Keterangan         Capaian         Keterangan         Capaian         Keterangan         Capaian				I	0	IV					
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IIK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IIK Kegiatan IK Kegiatan III 20 Berkas IV II : 14 Berkas IV II : 20 Berkas IV III : 20			100	2	2	Ξ		transmigrasi		Kebudayaan.	
trategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IT Target PK Rincian Kegiatan IK IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK			300	u	4	=	ransmigrasi yang dihasilkan			Pembangunan Manusia dan	
Indikator Kinerja     Target PK     Rincian Kegiatan     IK Kegiatan     IK Kegiatan     Target Realisasi     Realisasi     % Capaian     Keterangan       Persentase yang pidang n Desa, Desa, Desa, dan Transmigrasi     TWI : 14 Berkas pembangunan Desa, Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi     TWI : 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi     Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi     1     6      1     6      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0      1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0					4	-	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan			oleh Deputi Bidang	
Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan ITarget PK  100% Pensentase rekomendasi rekomendasi kebijakan di bidang kebijakan di bidang kebijakan di bidang pembangunan Desa, TW II : 20 Berkas Pembangunan Desa, TW III : 20 Berkas pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi runggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 2 100 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 2 100 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 5 6 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 5 6 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 5 6 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 6 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 5 6 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan III 2 6 5 600 Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan			800	œ	0	₹			_	dan Transmigrasi	Transmigrasi
Rincian Kegiatan  IK Kegiatan  IK Kegiatan  Target PK  Realisasi  Triwulanan  Capaian  Persentase rekomendasi rekomendasi Kebijakan di  TWII: 20 Berkas  Pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi  TWII: 20 Berkas  PK Capaian  Capaian  LII 6  Realisasi  Triwulanan  Capaian  Capaian  LII 6  Triwulanan  Capaian  Capaian  Capaian			600	o	4	=			TW IV : 27 Berkas	Peripangunan pesa, Daerah Tertinggal,	Daerah Tertinggal, dan
gis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan Target Realisasi 77 Kepalian Keterangan Persentase 100% Pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa daerah teringgal dan 1 6 6			100	2	N	=	ransmigrasi yang dihasilkan	15.62		kebijakan di	berkualitas di bidang
Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan IK Kegiatan IK Kegiatan Target Realisasi Triwulanan Capaian					6	-	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang			Persentase rekomendasi	Terwujudnya rekomendasi yang
	Catatan Monitoring	Keterangan Capaian	% Capaian Triwulanan			Targ	IK Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target PK	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis

## Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

																						ā		Sasaran Strategis
						tepat waktu.	dan Transmigrasi vang disusun secara	Pembangunan Desa,	substansi rancangan	permohonan ijin	Persentase rekomendasi						Manusia dan Kebudayaan.	oleh Deputi Bidang Pembangunan	dan Transmigrasi	Pembangunan Desa,	substansi rancangan	permohonan ijin	Persentase rekomendasi	Indikator Kinerja
									I VV IV .   Delkas				100% TW I: 3 Berkas TW II: 3 Berkas TW III: 2 Berkas TW IV: 1 Berkas								Target PK			
	pinipinali dan NC	unan ⊔esa, ⊔aeran Tertinggal, dan alui penanganan atas berkas masuk dari	onan		aaran kriiliyya, kari iansiilyiasi	orakarsa dan/atau g Pembangunan Desa,			i i alisi iliyi asi.	angunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	onan		pinpinan dan V.C	unan Desa, Daerah Tertinggal, dan alui penanganan atas berkas masuk dari	onan		uderan terunggar, dan transmigrasi	orakarsa dan/atau g Pembangunan Desa,			rransıngı ası.	angunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	onan	Rincian Kegiatan
	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.  Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.  Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.									dinasiikan.	rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi		dinaslikan.	rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi		dinasiikan,	rancangan POO di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibasilkan	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi	IK Kegiatan			
₹	Ξ.	=	-	< -	=	=	-	₹	=	=	-	<	=	=		₹	=	=		₹	ш	=	-	Target
_	0	0	2 2	0	ω		0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	ω .		0	0	0	2	0	Realisasi
100			100	3 300	1 33,3333333			3 300				1 100			2 100	3 300	1 33,33333333			3 300				% Capaian Triwulanan
																								Keterangan Capaian
																	78							Catatan Monitoring

## Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

-																				-						
																										Sasaran Strategis
			lepat waktu.	yang disusun secara	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,	Presiden di bidang	dihadiri oleh Presiden	riater sidang kabiner, rapat/pertemuan yang	Persentase rekomendasi terkait									Kebudayaan.	oleh Deputi Bidang Pembangunan	dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,	Presiden di bidang	dihadiri oleh Presiden	materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang	Persentase rekomendasi terkait	Indikator Kinerja
							I W IV : 4 Berkas	TW III : 5 Berkas	100% TW1: 4 Berkas											e			IVV IV : 4 Berkas	TW III : 5 Berkas	100% TW I : 4 Berkas	Target PK
	Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan		wakii Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	kebijakan alas materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau	5		Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	raparpertemuan yang dipimpin dan/atau dinadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang	et.				Penyusunan rekomendasi berupa butir wicara <i>lbriefing</i> sheet, analisis staf dan naskah pidato.		Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	atas materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil	an ebijakan		Wakii Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	kebijakan atas materi sidang kabinet, rapal/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau	Penyelenggaraan Rakor/Seminar/Diskusi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi		Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	rapat/perlemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet,	Rincian Kegiatan
	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadir oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin	IK Kegiatan
=		₹	Ξ	=	=	₹	Ξ	=	-	₹	Ξ	=	-	7	Ξ	=	-	<	Ξ	=	-	₹	Ξ	=	-	Target
	0	0	0	0	1	2	ω	0	0	0	0	0	w	ω	0	0	0	0	0	0	4	N	ω	0	0	
T .	,*		100		-4	ω	7	2		S.			w	ω		Ů	6.45		**	3.002	1	ω	7	2	Æ	Realisasi
					100	150	233,3333333	200					100	100							100	150	233,3333333	200		% Capaian Triwulanan
																										Keterangan Capaian
																										Catatan Monitoring

### Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi

			Penyusunan rekomendasi berupa butir wicara/briefing sheet, analisis staf dan naskah pidato.		Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PK Rincian Kegiatan
	tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin		tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	IK Kegiatan
<	E	=		₹	Ξ	Target
0 -	0 -	0	ω	ω	0	et Re.
	1	ı	ఆ	w		Realisasi
			100	100		% Capaian Triwulanan
						Keterangan Capaian
						Catatan Monitoring

### Keterangan:

- Sasaran Strategis sesuai PK
   Indikator Kinerja sesuai PK
- 3. Rincian Kegiatan dapat menggunakan nomenklatur komponen atau subkomponen atau kegiatan lainnya yang tidak menggunakan anggaran
- 4. Indikator kinerja kegiatan disesuaikan dengan rincian kegiatan (bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan)
- 5. Pengisian target dan realisasi secara triwulanan (tidak diakumulasi)
- 6. Keterangan dapat diisi dengan progress dari kegiatan atau kendala yang dihadapi jika tidak tercapai
- 7. Catatan Monitoring dikosongkan, diisi oleh Biro ARB yang bertugas melakukan reviu triwulanan

### **REALISASI ANGGARAN**

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil Periode s.d. 31 Desember 2016 Halaman: 1 dari 4

SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET Unit Organisasi Satuan Kerja Kementrian

DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2015 Tgl. 14 November 2015 DIPA No. Tgl.

Sisa Anggaran 0 0 600 400 178.371.600 178.371.600 78.371.600 4.300.600 78.371.600 78.375.600 178.371.600 Pemanfattan dan Pelapuran Data Desa 2016 coal 3 Mer 2015 d'Aemento Uding Saku Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerju Dalam Rangka Pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Online Tahun 2015 dan Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai SKP Online Tahun 2016, Tanggal 9 Februari 2016 77,70 77,70 77,70 66'66 66'66 66'66 100,001 100,00 100,00 100,001 65'26 750,000 750,000 Jumlah Realisasi 621.628.400 56.157.400 621.628.400 621.628.400 621.628.400 204.364.400 67.707.400 56.157.400 10.800.000 10.800.000 1.650.000 1.650,000 621.628.400 621.628.410 46.912.600 Bantuan Transport dalam kota a.n. Cordiyani I (2 orang) dalam rangka mengikuti Rapat Sinkronisasi Regulasi Undang Desa dalam rangka Persiapan Penyaluran, Jahy Saku Rapat Dalam kantor di Luar Jam Kerja mengenai Sosialisasi Pembuatan Sasaran Karja Pegawai (SkP) Tahun 2016, Rabu, 17 Februari 2016 (17 orang Bantuan uang transport dalam kota a.n. Rahayu Kadarwati dikik (3 orang) dalam rangka mengikuti. Rapat Pembahasan Persapan Pemberhukan Tim Mantoring 0 Realisasi LS 0 0 0 191.412.000 56.157.400 18.618,900 20.938.500 45.262.600 491.412,000 491.412.000 491,412,000 491.412,000 140.648.000 56.157.400 56.157.400 16.600.000 0 0 0 0 450,000 130.216.400 30.216.400 30.216.400 30.216.400 30.216.400 63.716.400 11.550.000 750.000 750,000 300.000 10.800.000 10.800.000 5.700.000 5.100,000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 Realisasi UP Biaya Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Barat a.n. Rahayu Kadarwati diki. (3 orang) tanggal 24-27 Meli 2016 Pagu Revisi C 0 0 0 0 0 0 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 300,000,000 208,665,000 67.708.000 56.158.000 56.158.000 750.000 750,000 10.800.000 10.800.000 46.913.000 1.650.000 1.650.000 Bieya Perjalanan Dinas ke Jawa Timur a.n. Dwiyanto, S.H., M.H. dkk. (3 orang) tanggal 26-29 April 2016 Perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan a.n. Yukma Posi dikk. (4 org) tgl 3-5 Agustus 2016 Pagu Awal 800,000,000 SKIO (SIDE DE) 70.997.000 56.297.000 56.297.000 2.700.000 12.000.000 800.000.000 800.000.008 800.000.000 800.000.008 208.665.000 12,000,000 137.668.000 4.500.000 4.500.000 JUMLAH REALISASI Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA ASDEP BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis Dra Rahavu Kadarwati, M.Si. Dra Rahayu Kadarwati, M.Sl. Dra Rahayu Kadarwati, M.Si. Dra Rahayu Kadarwati, M.Si. BELANJA PERJALANAN BIASA DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSHIGRASI Divilyanto, S.H., M.H. Yulvina Post, S.E. Cordivani Isjayati Uraian 000039-04/D-01 15-06-2016 000056-04/D-01 000065-04/D-01 07-04-2016 009017-04/C-01 12-08-2016 000028-04/C-01 009062-04/0-01 23-02-2016 000004-04/C-01 -001 524113-RM 524111-RM 524114-RM 521219-RM 411.AB 411.AA 411 17-05-2016 18-02-2016 23-08-2016 001,001 0504 05

Blave Seminar Nasional Agribisms dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III di Jawa Timur tanggat 17-19 Mei 2016 a.n. Sri Darran dkk (3 orang) \$150.000,

Cordivani Isjayati

12-08-2016 000026-04/C-01

450,000

. 12-08-2016 000027-04/C-01	Dewi Wulansari, S.AP.			1,260,000	(2)			
	State Semilar Perhapsing Person California Albam Sandisens Kadautana Nasimal Gilbarian Semilar	ordistrice Kadaillatan Barre	2 Freiser Nacional Allegan	April and Fernand 18, 10 Me	V 2016 2 2 Down 18th	Comment (1) Agents	200 000	
522151-PM	REI ANTA TACA DOCEECT	ביימיייטייטייטייטייטייטייטייטייטייטייטייט	or reassified at control to		C ZUBO GIR, LÆRH VYGK	or (princip <) was independent	* KD *UU.UU.	
-001	DECAUSA SASA PROTESI	35,000,000	0 (	o (	0 (	0	00'0	0
TOO -	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	35.000.000	0	0	0	0	00'0	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	15.000.000	0	0	0	0	00'0	0
-001	ä	15.000.000	0	0	0	0	00'0	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	33.350.000	0	0	0	0	00'0	0
-001		33.350.000	C	c	c	C	0	C
524110-PM	GALL OUTLES DAVET MEETING BALLA IN THE	40 018 000	מסט רייר די	0 0	0 00		00,0	2
Ž	SECUNDS TENDALMAN DINAS PAREL MEELING LOAK KOTA	49.818.000	45.263.000	•	45.262.600	45.262.600	66'66	400
-001		49.818.000	45.263.000	0	45.262.600	45.262.600	66'66	400
11-02-2016 000001-04/0-01	Eko Nuryaddin K.J., S.Sns.		0	0	6.921,600			
	Biaya Perjalahan Dinas ke D.I. Yogyakarta a.n Eko Nuryaddin di	381. (2 orang) tanggal 22 Januari 2016 - 24 Januari 2016	ruari 2016 - 24 Januari .	2015				
14-04-2016 000024-04/D-01	Dewi Wulansari, A.Md.		0	0	11.549,000			
	Biaya Perjalahan Dinas ke Bandar Lampung a.n. Endang Sri And	dayani diki. (3 orang) tanggal 16 Mei 2016 s.d. 18 Mei 2016	ral 16 Net 2016 s.d. 18 N	lei 2016				
06-06-2016 030048-04/D-01	Drs Adlim		0	0	15,403,400			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Jawa Timur a.n. Adlim dkk. (3 orang)	() tanggal 17-19 Mei 2016						
24-06-2016 000057-04/D-01	Dewi Wulansart, S.AP.				11 388 600			
	Braya Perjalanan Dinas ke Yogyakarta a.n. Dewi Wulansari dkk.	. (2 orang) tanagal 2-5 Juni 2016						
	Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh	0	94.044.000	50.516.400	39,228,000	89.744.400	95,42	4,299,600
	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan						Œ.	
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	0	750.000	200,000	0	500.000	99'99	250.000
-001	1	0	750.000	500.000	0	500.000	99'99	250.000
01-11-2016 000038-94/C-91	Dewi Wulansan, S.AP.		0	500,000			20/20	00000
	Biaya Seminar Strategi Pemberdayan Masyarakat di Era MEA tan	iggal 7	s.d. 9 Oktober 2016 di Yoqyakarta a.n. Dev	Dewi Wulansan dkk (2 orang) @ Rp 250,000-	) @ Rn 250.000-			
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA		82.037.000	50.016,400	28.936.000	78.952.400	96.24	3 084 600
-001		0	82.037.000	50.016.400	28.936.000	78.952.400	96 74	3 084 600
18-10-2016 000078-04/D-01	Dra Rahayu Kadanwati, M.Si.			0	21,760,000			
	. Biaya Perjalahan Dinas ke Jawa Timur a.n. Rahayu Kadarwati dkk. (3 orang) Tanggal 25-28 Oktober 2016	Jkk. (3 orang) Tanggal 25-28	8 Oktober 2016					
20-10-2016 000081-04/D-01					7176.000			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Banten a.n. Dwiyanto dkk. (4 orang)	Tanggal 10-12 Oktober 2016	12					
22-11-2016 000049-04/C-01	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputh			21,380,400				
	Blaya Perjelanan Dinas ke Gorontalo a.n. Yukima Posi Ukk. (3 orang) Tanggal 25-28 Oktober 2016	rang) Tanggal 25-28 Oldobi	ar 2016					
22-11-2016 000051-04/C-01	Bendahara Pengeluaran Pembantu Deputi		0	2.240.000				
	Biaya Perjalanan Dinas ke Garut a.n. Dewi Wulansan Tanggal 20-22 Oktober 2016	20-22 Oktober 2016						
13-12-2016 000056-04/C-01	Dwiyanto, S.H., M.H.		0	5,628,000	0			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Bogor, Jawa Barat a.n. Dwiyanto dkk.	k. (3 orang) Tanggal 1-3 Desember 2016	sember 2016					
15-12-2016 000060-04/C-01	Dra Rahayu Kadarwati, M.Si.			20,769 (90)	9			
	Biaya Perjalanan Ulnas ke Lampung a.n. Rahayu Kadarwati dilk.	c. (4 orang) Tanggal 29 November-02 Desember 2016	ember-02 Desember 201	4.00				
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR	0	11.257.000	0	10.292.000	10.292.000	91,42	965.000
,	KOTA						ie.	199
-001	1	0	11.257.000	0	10.292.000	10.292.000	91,42	965.000
06-10-2016 000076-04/9-01			0	0	10.292.000			
	Braya Perjalantan Dinas ke Yogyakarta a.n. Deva Vituansan dikk.	. (2 orang) tanggal 7-9 Oktober 2016	Der 2016					
Penyusi Prakarsi	Penyusunan Rekomendasi Terkait Persetujuan Permohonan Ijin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100.585.000	6.258.000	300.000	5.958.000	6.258.000	100,00	0
di Bidar	di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi							

	Vraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS Ju	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	34.357.000	0	0	0	0	0.00	0
-001		34,357,000	0	0	0	0	00'0	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	2.700.000	0	0	0	0	00'0	0
-001	Ä	2.700.000	0	0	0	0	00'0	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	7.500.000	0	0	0	0	00'00	0
-001		7.500.000	0	0	0	0	00'0	0
412.AB	Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis	56.028.000	6.258.000	300.000	5.958.000	6.258.000	100,00	0
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	4.500,000	300.000	300.000	o	300.000	100,00	0
-001	1	4.500.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00	0
01-03-2016 000011-04/C-01	Endang Srl Andayani		0	300,000	0		B. F.	
	dkk (3 orang)	pade	Februari 2016					
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	0	0	0	0	00'0	0
-001	ī	12.000.000	0	0	0	0	00'0	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR. KOTA	39.528.000	5.958.000	0	5.958.000	5.958.000	100,00	0
100-	- 11	39.528.000	5.958.000	0	5.958,000	5.958.000	100,00	0
12-02-2016 000005-04/D-01	L. Devri Wulansari, A.Md.		0	0	5.958,000			
	Biaya Pertalanan Dinas ke Jawa Barat a.n Endang Sri Andayani, S.S.,	i., M.Pd. dkk. (3 orang) (	M.Pd. dkk. (3 orang) tanggal 19 Februari 2016 - 21 Februari 2016	5 - 21 Februari 2016				
413 Penyus Atau Penyus dan/ata	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/Atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah	490.750.000	585.077.000	66.200.000	344.806.000	411.006.000	70,24	174.071.000
413.AA	gga, dan ita Pendimpulan data	81 111 000	000 873 78	c	000 000	000 000	9	•
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	65.511.000	47.578.000	0	47.578.000	47.578.000	100,00	<b>&gt;</b> C
-001		65.511.000	47.578.000	o C	47 578 000	47 578 000	100,001	Э С
28-04-2016 000029-04/D-01	Tulvina Posi, S.E.		0	0	20.342.000	000:075:71	00,001	0
	Biaya Perjalanan Dinas ke Sumatora Barat a.n. Yulvina Posi dkk. (3	orang) tanggal 19 s.d. 22 April 2016	2 April 2016					
10-06-2016 000052-04/0-01			0	0	27,236,000			
	Biaya Perjalanan Dinas ke Bali a.n. Drs Adim dkk. (4 orang) tanggal 31 Mei - 03 Juni 2016	il 31 Mei - 03 Juni 2016						
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.600.000	0	0	0	0	00'0	0
-001		3.600.000	0	0	0	0	00'0	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM	12.000.000	0	0	0	0	00'0	0
1345	KOTA							
-001		12.000.000	0	0	0	0	00'0	0
413.AB	Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis	213.280.000	198.348.000	36,400,000	161.948.000	198.348,000	100,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	32.900.000	25.000.000	25,000,000	0	25.000.000	100,00	0
-001		32.900.000	25.000.000	25,000,000	0	25.000.000	100,00	0
01-04-2016 000015-04/C-01			0	25.000,000	C			
	Pembayaran honor nara sumber dan moderator Seruinar Nasional Evaluesi Pelaksanaan Program Dana desa pada langgal 16-18 Maret 2016 di Bandung, Jawa Barat	valuasi Pelaksanean Pro	gram Dane dese pade la	mggal 16-18 Maret 2019	i di Bandung, Jawa Barat	423		
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	2.100.000	0	0	0	0	00'0	0
-001	1	2.100.000	0	0	0	0	00'0	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	100,00	0
-001		12,000,000	11,400,000	11,400,000	0	11.400.000	100,00	0
01-03-2016 000007-04/C-01			0	6.300.000	0			il.
	Uang saku RDK dalam rangka persiapan seminar Esaluasi Pelaksanaan Prgram Dana Desa sabanyak 21 orang pada Selasa, 23 Februari 2016	san Proram Dana Desa s	ebanyak 21 orang pada	Selesa, 23 Februari 201	10			

Sisa Anggaran			0	0					4.495.000		000.006			Sar 2016 di Tangerano.	0	0	2.600.000		7.000.000		ratual remoduțiuan		000'566		995.000				a taliqqal 10-11	0	0				169.576.00		
lisasi %			8.000 100,00	8,000 100.00					0.000 97,34		19.100.000 95,50			an, 9-11 Movem	00'0 0	00'0 0	10.700.000 80,45		0.000			Karamintan Land	0.000 99.26		0.000 99,26				mbanguran pad	00'0 0	00'0 0	00'0				0 0.00	
Jumlah Realisasi			161.948.000	161.948.000					165.080.000		19.10	19.100.000		aen Pembangung			10.70	, .	10.700.000		Degat opeya Mc	A conference i francis	135.280.000		135.280.000				Pemerataan Par								
Realisasi LS	0		161.948.000	161.948.000	87,548,000		74,400,000		135.280.000		0	0	0	Menciptakan Pemerat	0	0	0	c	9 6	December Total days		Canal Tarting	135.280.000		135.280.000	70,880,000		64,400,000	· Uapaya Menciplakan	0	0	0	0	0	0	0	100
Realisasi UP	5,100,000	et 2015 (17 0rang)	0	0	0			aret 2016, di Banduno	29.800.000		19,100,000	19,100,000	19,100,000	ertmoyal sebagai Upaya	0	0	10.700.000	סטט סטב טו	000.000 a	WASTERDER	5,500,000	or Dornonatad Demband	0		0	0			aeran Tertinggal Sebaga	0	0	0	0	0	0	0	K.
Pagu Revisi		Kasional, Kamis, 31 Har	161.948.000	161.948.000	0.112	S orang) tanggal 16-18	0	a Desa, tangual 17-18 M	169.575.000		20.000.000	20.000.000	0	Pembangunan Daerah Ti	0	0	13.300.000	12 300 000	200:000:01	net Dublik Mondomon D		Diebrief Duhlig Wanderer	136.275.000		136.275.000	0	11 November 2016	0	epatas Pembangunan D	0	0	0	0	0	169.576.000	169.576.000	
Pagu Awal		uasi Peleksanaan Saminar	166.280.000	166.280.000		at Indrijarso, M.Sc. dkk, C		Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa, tananai 17-18 Maret 2016, di Banduno	196.359.000		0	0		Diskusi Publik Mendorang	30.593,000	30,593,000	0	c		Percianan melakcamaan Die		Politics Ford Palatranaan	0		0		Juk. (42 orang) Tanggal 9-		gan tenna Mendorong Perc	165.766.000	165.766.000	0	0	0	0	0	
Uraian	Dra Rahayu Kadarwati, M.Si.	Uang saku rapat dalam kantor di luar jani kerja mengenal Evaluasi Pelaksanaan Seminar Nasional, Kams, 31 Maret 2016 (17 Drang)	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	1	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabinet	Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung, Jawa Barat a.n. Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc., dkk. (35 orang) tanggal 16-18 Maret 2016		Biaya Paker Meeting Fullmoard dalam rangka Seminar Nasional	Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BELANJA JASA PROFESI		Dra Rahayu Kadarwatt, M.Sl.	Pembayaran hanararum narasumber dan moderator Kagiatan Diskusi Publik Mendorang Pembangunan Daeran Tertinggal sebagai Upaya Mengratum Pemerataan Pembangunan, 9-11 November 2016 or Tangerang	BELANJA PERJALANAN BIASA	ì	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM		Dra Rahakii Kadarwafi M Si			Using SARU (2021) data was data manaka Evaluari Rakii Balatennaan Dickusi brittik Manakarana Dambaratana Dambarata	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR	KOTA	ī	Dra Rahayu Kaciarwati, M.Si.	Biaya Perjalanan Dinas ke Tanggerang a.n. Rahayu Kadarwati dkk. (42 orang) Tanggal 9-11 November 2016		Biaya Paket Meeting Fullboard dalam rangka Diskusi Publik dengan tama Mendorong Percepatan Pembangunan Daeran Tertinggal Sebagai Uapaya Menciptakan Pemerataan Pembangunan pada iningaal 10-11	BELANJA PERJALANAN LAINNYA - LUAR NEGERI	5 min 1 min	Alokasi Tambahan Anggaran APBN-P TA 2016	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	2	Self Blocking Penghematan/Pemotongan TA 2016 (Blokir)	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	
	08-04-2016 000618-04/C-01		524119-RM	-001	-08-03-2016 000009-04/D-01		18-04-2016 000025-04/D-01		413.AC		522151-RM	-001	. 24-11-2016 000054-04/C-01		524111-RM	-001	524114-RM	-001	02-11-2016 000047-04/0-01		21-12-2016 000070-04/C-01		524119-RM		-001	31-10-2016 000085-04/D-01		. 28-11-2016 000095-04/D-01		524219-RM	-001	413.AD	521219-RM	-001	413.AE	521219-RM	1000

